

PENERAPAN KONSEP BARRIER FREE TOURISM PADA WISATA WADUK LOGUNG KUDUS

HANIFAH FAIRUZA PRABARINI*, SUZANNA RATIH SARI, SRI HARTUTI WAHYUNINGRUM

Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

*hanifairuza@students.undip.ac.id

PENDAHULUAN

Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten yang memberikan kontribusi besar pada perkembangan perekonomian di Jawa Tengah. Selain perkembangan perekonomiannya yang pesat, perkembangan pariwisata di Kudus juga tidak kalah pesat. Kudus memiliki beberapa jenis wisata diantaranya wisata alam, wisata sejarah, wisata keluarga, wisata desa, wisata religi, wisata kuliner, wisata malam dan wisata belanja. Di setiap tempat wisata memiliki keindahan dan keunikannya masing-masing. Namun yang paling banyak diminati adalah wisata alam.

Pada tahun 2014-2018 pemerintah Kabupaten Kudus membangun Waduk Logung untuk dijadikan destinasi wisata. Awalnya waduk ini berfungsi untuk mengurangi debit air Sungai Logung yang bermuara di Sungai Juwana sehingga air banjir dapat berkurang, namun seiring berjalannya waktu jumlah pengunjung waduk meningkat sehingga pemerintah ingin menjadikan Waduk Logung sebagai salah satu destinasi unggulan Kudus. Namun sangat disayangkan di Kawasan waduk tersebut belum terdapat fasilitas wisata yang dapat dijangkau oleh semua kalangan termasuk fasilitas bagi penyandang disabilitas. Uraian diatas menjadi latar belakang munculnya gagasan bahwa diperlukannya perencanaan dalam bentuk konsep pengembangan obyek wisata alam yang ramah untuk penyandang disabilitas di Waduk Logung Kudus. Latar belakang dibangunnya wisata waduk ini dilatar belakangi juga oleh beberapa hal, yakni:

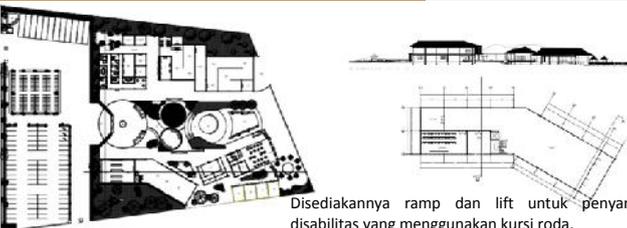


KONSEP DAN TEORI PERANCANGAN

Urgensi dari perencanaan dan perancangan sebuah fasilitas wisata waduk adalah tempat wisata yang dapat mengedukasi pengunjungnya (edukasional) dan universal sehingga semua golongan dapat belajar bersama dan menikmati keindahan waduk. Selain itu sebagai pemanfaatan lahan untuk konservasi lingkungan dan penyegaran publik. Oleh karena itu *edupark* dengan konsep *barrier free tourism* adalah solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa faktor pendukung pembangunan *edupark* di lingkungan Waduk Logung, yakni ditemukannya situs purbakala di sekitar lokasi waduk dan juga lokasi waduk yang mendukung karena dihimpit oleh Kawasan wisata 'segitiga emas' yakni Gunung Muria, desa wisata Kandangmas dan Museum Kretek.

Konsep yang digunakan adalah **Barrier Free Tourism**. Upaya berkelanjutan untuk memaskan tujuan wisata, produk dan layanan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari keterbatasan fisik, cacat atau usia. Kawasan Wisata Waduk ini menggunakan konsep Barrier Free Tourism atau biasa juga disebut dengan Accessible Tourism adalah upaya berkelanjutan untuk memastikan tujuan wisata, produk dan layanan dapat diakses oleh semua orang, terlepas dari keterbatasan fisik, cacat atau usia mereka. Pariwisata yang dapat diakses memungkinkan orang-orang dengan persyaratan akses, termasuk mobilitas, visi, pendengaran, dan dimensi kognitif akses, berfungsi secara independen dan dengan kesetaraan dan martabat melalui produk, layanan, dan lingkungan pariwisata yang dirancang secara universal (Darcy, 2009).

PENERAPAN PADA DESAIN



Disediakannya ramp dan lift untuk penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.

Fasilitas Penunjang



KAJIAN PERANCANGAN

Perancangan didasari dengan melakukan studi banding terhadap beberapa kawasan wisata waduk yang terletak di Jawa Tengah seperti Wisata Waduk Jatibarang, Wisata Waduk Gajah Mungkur dan juga Wisata Waduk Sempor. Diperoleh bahwa Kawasan wisata tersebut mayoritas belum memiliki fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas. Maka diperlukan kajian yang membahas khusus tentang barrier free tourism atau yang biasa dikenal dengan universal desain. Fasilitas apa saja yang diperlukan untuk penyandang disabilitas dan semua itu dibahas dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang membahas tentang Hak Asasi Manusia termasuk juga penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan juga Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Barrier free tourism atau biasa dikenal dengan universal desain memiliki 7 prinsip yang menyediakan kesetaraan dalam aksesibilitas. Prinsip tersebut diharapkan dapat diterapkan ke dalam desain dan dapat memenuhi kebutuhan semua pengunjung yang berkebutuhan khusus. Berikut ini rincian 7 prinsip yaitu:

- 1. Kesetaraan penggunaan.** Desain bangunan dapat digunakan oleh semua orang dengan kemampuan yang berbeda. Artinya, setiap bentuk, fungsi, dan fasilitas pada bangunan itu dapat memenuhi kebutuhan penggunaannya.
- 2. Fleksibel.** Desain bangunan dan setiap ruang di dalamnya mampu menjangkau kebutuhan dan kemampuan penggunaannya.
- 3. Penggunaan yang simpel dan sesuai kebutuhan.** Setiap fungsi pada bangunan harus mudah dimengerti oleh penggunaannya berdasarkan pengalaman, pengetahuan, bahasa, kemampuan, dan tingkatan intelektualitasnya.
- 4. Informatif dan mudah dimengerti.** Desain mudah dimengerti untuk setiap kondisi dan kemampuan sensorik penggunaannya.
- 5. Antisipatif.** Desain dapat meminimalisir dan memiliki toleransi pada kesalahan pemakaian. Setiap bentuk pada bangunan dapat mengantisipasi kecelakaan hingga kondisi tidak terduga.
- 6. Tidak memerlukan usaha terlalu besar.** Desain bangunan harus dapat digunakan secara efisien, nyaman, dan tidak menyebabkan kelelahan dalam penggunaannya.
- 7. Memiliki pendekatan terhadap kebutuhan ukuran dan ruang.** Desain bangunan mudah dijangkau dan menyesuaikan kondisi fisik, ukuran, serta tingkat fleksibilitas penggunaannya.

KESIMPULAN

Desain ini sudah memenuhi konsep Barrier Free Tourism dengan fasilitas khusus yang diberikan untuk penyandang disabilitas seperti lift, ramp, fasilitas audio, toilet khusus, parkir khusus serta guide khusus. Bagi pengunjung yang memiliki kebutuhan khusus semua fasilitas sudah tersedia. Diharapkan tempat wisata di Indonesia mulai menerapkan konsep *barrier free tourism* karena selama ini pengetahuan mengenai barrier free tourism masih belum banyak dibahas dan dipahami oleh masyarakat Indonesia.



DAFTAR REFERENSI

- Heriawan, Rusman. 2004. Peran dan Dampak Pariwisata pada Perekonomian. Indonesia. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang membahas tentang Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas. Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. World Tourism Organization (WTO), 1999, International Tourism A Global